

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat, harus didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) pilar yaitu negara, pemerintah, hukum dan aparaturnya penegak hukum, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat yaitu dengan dibangunnya PLTA Batang Toru di Provinsi Sumatera Utara, perusahaan yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengerjakan pembangunan PLTA Batang Toru yaitu PT. XYZ. Akan tetapi, PLTA tersebut dapat berdampak pada terancamnya habitat orangutan tapanuli yang hampir punah. Untuk mengatur perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban PT XYZ terhadap pembangunan PLTA Batang Toru yang berdampak terancamnya habitat orangutan tapanuli dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta untuk memahami implementasi pertanggungjawaban PT. XYZ terhadap pembangunan PLTA Batang Toru yang berdampak terancamnya habitat orangutan tapanuli dihubungkan dengan prinsip GCG. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara kepada pihak terkait yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu pertanggungjawaban PT. XYZ berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah belum diterapkan oleh perusahaan PT. XYZ, terbukti dengan hasil analisis PT. XYZ dalam melakukan pembangunan PLTA Batang Toru masih mengkhawatirkan terancamnya habitat orangutan tapanuli yang keberadaannya hampir punah dimana hewan tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Serta implementasi pertanggungjawaban PT. XYZ berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik belum dilaksanakan dengan baik dan optimal.

Kata kunci: PLTA Batang Toru, Terancamnya Habitat Orangutan Tapanuli,

Perseroan Terbatas, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

ABSTRACT

Public welfare must be supported by at least 3 (three) pillars, namely the state, government, law and law enforcement apparatus, as referred to in the 1945 Constitution the fourth paragraph stating that the government of the state of Indonesia which protects all Indonesian people and to advance public welfare, educates national life and participate in carrying out world order based on freedom, eternal peace and social justice. The government's effort to prosper the people is the construction of the Batang Toru Hydroelectric Power Plant in North Sumatra Province, a company trusted by the government to work on the construction of the Batang Toru Hydroelectric Power Plant, namely PT. XYZ. However, the hydropower plant can have an impact on the threatened habitat of the endangered tapanuli orangutan. To regulate limited liability companies, the government issued Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This law regulates matters relating to good corporate governance. This study aims to understand the responsibility of PT XYZ for the construction of the Batang Toru Hydroelectric Power Plant which affects the threatened habitat of the tapanuli orangutans associated with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and to understand the implementation of the responsibility of PT. XYZ on the construction of the Batang Toru Hydroelectric Power Plant which affected the habitat of the tapanuli orangutan habitat is related to GCG principles. This research method uses a normative juridical approach by examining secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with research specifications using descriptive analysis. The data collection technique used in this study is the study of literature and is equipped with interviews with relevant parties relevant to the problem under study. Based on the results of research and discussion, conclusions are drawn that the accountability of PT. XYZ based on Limited Liability Company Law is not yet implemented by the company PT. XYZ, proven by the results of the analysis of PT. XYZ in carrying out the construction of the Batang Toru Hydroelectric Power Plant is still concerned about the threat of the habitat of the Tapanuli orangutan, whose existence is almost extinct, where the animal is protected by laws and regulations. And the implementation of the responsibility of PT. XYZ based on the principles of good corporate governance has not been implemented properly and optimally.

Keywords: Batang Toru Hydroelectric Power Plant, Tapanuli Orangutan Habitat Threat, Limited Liability Company, Good Corporate Governance.